

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- . *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grafika, 2016.
- Ahmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2006.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum : Perpektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Hammer, J.D.G. *Combating Child Labour: A Handbook for Labour Inspector*. Jenewa: ILO, 2002.
- Hulu, Dalizanol, *et. al. Buku Ajar Pengantar Bisnis*. Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. *Ketenagakerjaan Dalam Data Edisi 6*. Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Jakarta, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2004.
- . *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Matraman: Mataram University Press, 2020.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- . *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta : Kompas, 2007.
- Sajtipto Rahardjo, *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* Bandung: Sinar Baru, 2009).

- Roselina, dkk. *Ketenagakerjaan Dalam Data Edisi 2*. Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, 2023.
- Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta: Liberty, 1988.
- Situmorang, Basni. *Kompendium Hukum tentang Bidang Ketenagakerjaan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012.
- Situmorang, Victor M. & Jusuf Juhir. *Aspek Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Rineka Cipta: Jakarta, 1994.
- , *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: PT. Rineka, 2009.
- Soegoto, Eddy Soeryanto. *Marketing Research the Smart Way to Solve a Problem*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- , *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suyatna, Bagong. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syahrizal, Winarti dan Darda. *205 Pertanyaan tentang PT, CV Persero & Badan Usaha Lainnya*. Jakarta Timur: Laskar Aksara, 2012.
- Tisnata, H.S. *Implementasi Hukum Dalam Perspektif dan Teori*. Bandar Lampung: PT. Pusaka Media, 2022.
- Victor, M. Situmorang & Jusuf Juhir. *Aspek Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- W. Yudho dan H. Tjandrasari. *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat, Majalah Hukum dan pembangunan*. Jakarta: UI Press, 1987.
- Wahyono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Widjaya, Djustiawan, *et. al.* *Mewujudkan Data Ketenagakerjaan yang Andal Melalui Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan*. Jakarta: Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI, 2022.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Artikel/Jurnal

Ayu, Ria Novita, dkk. “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo.” *Diponegoro Law Journal* Vol. 6, No. 2 (2017): 66-67.

Dalimunthe, Nikmah, dkk. “Penerapan Perjanjian Kerja Dalam Perusahaan Terhadap Hak Ketenagakerjaan.” *Jura : Jurnal Riset Akuntansi* Vol. 1, No. 3 (2003): 86.

Fiqri, Yoga Wicaksono dan Kristiyadi. “Tinjauan Aspek Preventif dan Edukatif Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menilai Pembuktian Perjudian Sabung Ayam Sebagai Adat budaya di Bali.” *Jurnal Verstek* Vol. 9, No. 2 (2021): 32.

Mahrus, M. Ali. “Sosialisasi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat.” *An-Natiq: Jurnal Kajian Interdisipliner* Vol. 1, No. 1 (2021): 6.

Lessil, Marcellino, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, “Pemalsuan Bukti C1 Rekap,” *TATCHI : Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 11 (2022): 1134.

Sandole, Erlis Milta Rin, dkk. “Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Terminal BBM Bitung.” *Jurnal EMBA* Vol. 3, No. 3 (September 2015): 65.

Tony, R. Prayogo. “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang.” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 13, No. 2. (2016): 194.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Dwita, Novrianti. “Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan terhadap kecelakaan kerja di Kabupaten Musi Rawas”, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, 2018.

Nainggolan, Adinda. “Tinjauan Hukum Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Terhadap Perundungan di Tempat Kerja (*Workplace Bullying*) di Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan di Indonesia”, *Penulisan Hukum*, Universitas Gadjah Mada, 2021.

Phrygian, Agustinus R.A. “Peranan Pengawas Ketenagakerjaan Dalam Menegakkan Norma Upah Minimum Pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu di Provinsi Jawa Timur Tahun 2022”, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, 2023.

Satria, Mirna Buana. “Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty*) Dengan Asas Keadilan (*Substantial Justice*) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Tesis*, Universitas Islam Indonesia, 2010.

Internet

Theodora, Agnes. “Ketenagakerjaan : Data Belum Padu, Pengawasan Terbatas.” Kompas.id. https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/03/15/data-belum-padu-pengawasan-terbatas?status=sukses_login&status_login=login&loc=hard_paywall (diakses 28 September 2024).

Biro Humas Kemnaker. “Tak Miliki Peraturan Perusahaan, PT DGI Kena Sanksi Hukum”, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.” Kemnaker.go.id. <https://kemnaker.go.id/news/detail/tak-miliki-peraturan-perusahaan-pt-dgi-kena-sanksi-hukum> (diakses 20 Agustus 2024).

Dedy. “Sekjen MK: Tumpang Tindih Aturan Sebabkan Ketidakpastian Hukum.” mkri.id. <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13517&menu=2>. (diakses 20 Desember 2016).

Disnakertransgi DKI Jakarta. ‘Unit Kerja’, [disnakertrans.jakarta.go.id](https://disnakertrans.jakarta.go.id/unit-kerja), <https://disnakertrans.jakarta.go.id/unit-kerja>, diakses tanggal 30 Juli 2024.

Fither, Chris. “Ombudsman dan Paradoks Pengawasan Ketenagakerjaan.” Ombudsman.go.id. <https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--ombudsman-dan-paradoks-pengawasan-ketenagakerjaan>. (diakses 24 Agustus 2024).

Hasan, Mohamad Toha. “Kewajiban Perusahaan Membuat Peraturan Perusahaan dan Sanksinya.” [bplawyers.co.id. https://bplawyers.co.id/2020/05/27/kewajiban-perusahaan-membuat-peraturan-perusahaan-dan-sanksinya/](https://bplawyers.co.id/2020/05/27/kewajiban-perusahaan-membuat-peraturan-perusahaan-dan-sanksinya/). (diakses 16 Maret 2024)

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. “Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023 dan Proyeksi Tantangan 2024.” [Setkab.go.id. https://setkab.go.id/dinamika-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2023-dan-proyeksi-tantangan-2024/](https://setkab.go.id/dinamika-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2023-dan-proyeksi-tantangan-2024/) (diakses 28 April 2024).

International Labour Organization dan Kementerian Ketenagakerjaan RI, “Lembar Fakta : Pengawasan Ketenagakerjaan di Indonesia.” [ilo.org.id. https://www.ilo.org/publications/manpower-act-indonesia-guide-book](https://www.ilo.org/publications/manpower-act-indonesia-guide-book) (diakses 15 Maret 2024).

Syarifudin, Nabi. “Pengamat: Jakarta akan Jadi kota Bisnis seperti New York.” [jakarta.bisnis.com. https://jakarta.bisnis.com/read/20230922/77/1697516/pengamat-jakarta-akan-jadi-kota-bisnis-seperti-new-york](https://jakarta.bisnis.com/read/20230922/77/1697516/pengamat-jakarta-akan-jadi-kota-bisnis-seperti-new-york). (diakses 30 April 2024).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198).

Peraturan Presiden Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/I/2011 tentang Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39).

Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Nomor 15 Tahun 2012 tentang Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 743).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2099).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1753).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 12).

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 147 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Berita Negara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62045).